



Massa Demo Kejati Terkait Undiksha

DENPASAR - Kasus Undiksha memang menyita perhatian publik Bali. Apalagi kasus ini sudah menahan dua orang tersangka. Namun kondisi ini juga membuat gundah warga Jinengdalem, lantaran Kepala Desa-nya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Atas kondisi ini warga masyarakat Jinengdalem mendatangi Kejati Bali.

Tiga nama yang mencatatkan namanya di daftar hadir Kejati Bali, adalah Made Rudiarta, Komang Yudi dan Gede Karang. Menurut Kasipenkum Kejati Bali juga ada LSM Gema Nusantara (Genus) dengan pimpinan Anton. "Tapi saya tidak tahu, bergerak di bidang apa LSM ini. Tapi ikut tadi," ujar Ashari Kurniawan.

Dia mengatakan massa datang dengan tiga aspirasi inti. Dan mereka hadir sekitar 50 orang dan perwakilannya menemui Aspidus Erna Norma termasuk Ashari. Dia menyebutkan yang pertama meminta agar Kejati Bali dalam menegakkan hukum tidak ada yang menunggangi. "Jangan sampai ada pihak yang menanggapi, atau titipan - titipan pihak tertentu dalam penegakkan hukum kasus Undiksha ini. Itu yang pertama permintaan mereka," ungkapnya ■

► Baca *Massa...* Hal 31

Tanya Peran Kades Jinengdalem

■ MASSA...

Sambungan dari hal 21

Kemudian yang kedua adalah, meminta penjelasan kenapa sampai Kepala Desa Jinengdalem bernama Mawa menjadi tersangka. "Mereka keberatan Kades mereka dijadikan tersangka dan sudah diumumkan ke media," lanjut Ashari menyampaikan sikap kedua.

Yang ketika mereka bertanya, peran Kades Jinengdalem dalam kasus ini. "Atas kondisi ini, pihak Kejati sudah memberikan jawaban dan apresiasi atas langkah ini," ungkap Ashari.

Dia juga mengatakan sudah menjawab, atas tiga sikap dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi ke Kejati. Yang pertama memastikan tidak ada yang menunggangi. Kemudian

terkait dengan nama Kades yang sudah jadi tersangka, juga beberkan bahwa sudah ada dua alat bukti yang cukup menjadi tersangka. "Terkait peran kami sudah jelaskan sekilas, bahwa peran Kades dalam kasus ini ada," pungkask Ashari. Seperti halnya berita sebelumnya, pengadaan lahan 3,7 hektare merugikan negara Rp 3 miliar lebih. (art/yes)

Edisi : Selasa, 28 Juli 2015

Hal. : 21 dan 31



Semua Fraksi DPRD Bali Soroti Rendahnya Serapan Silpa

DENPASAR— Rendahnya serapan sisa lebih anggaran (Silpa) menjadi sorotan fraksi-fraksi di DPRD Bali. Salah satunya disoroti Fraksi Partai Golkar. Itu disampaikan dalam rapat paripurna ke-11, masa persidangan ke-2 Tahun Sidang 2015 DPRD Bali tentang Pandangan umum terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2015, Senin kemarin (27/7).

Serapan anggaran pemerintah yang masih kurang dari 30 persen hingga awal Juli 2015, Fraksi Golkar mendorong agar gubernur secara serius meningkatkan realisasi anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. "Sehingga dengan pengeluaran pemerintah secara maksimal akan menjadi stimulus dalam mendorong pertumbuhan daerah," terang juru bicara Fraksi Golkar DPRD Bali I Nyoman Wirya.

Selain itu, beberapa pokok pikiran lain seperti tingkat inflasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan dan pemerataan investasi di Bali juga masih menjadi catatan fraksi Golkar. Tidak hanya itu, keberadaan aset yang belum

dikembangkan menjadi potensi pendapatan juga masih menjadi catatan. Terkait keberadaan aset, Fraksi Golkar mendorong agar pihak eksekutif segera mengambil langkah strategis agar pendapatan dari sektor ini meningkat. "Salah satu kebijakan umum perubahan pendapatan daerah adalah dengan mengkaji ulang pengenaan kenaikan tarif retribusi daerah," terangnya.

Termasuk dalam pandangan fraksinya, Golkar juga meminta penjelasan kepada gubernur terkait prospek penyertaan modal pemerintah Provinsi Bali di tol Bali Mandara. Poin lain, Golkar juga meminta agar program Simantri tetap dilanjutkan dan mendorong agar PAD Bali tetap ditingkatkan hingga Rp 2,9 triliun. Sementara itu, Fraksi Demokrat, Komang Nova Sewi Putra menyampaikan apresiasi kepada gubernur dengan rencana perubahan pajak kendaraan bermotor (PKB) naik sebesar Rp 93 Miliar lebih atau 11,54 persen dari target APBD Induk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 811 Miliar lebih menjadi Rp 905 Miliar lebih, walaupun realisasi sampai bulan Mei 2015 Rp 369

Edisi : Selasa, 28 Juli 2015

Hal. : 24



Sambungan - -



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

KOMPAK: Pandangan fraksi-fraksi DPRD Bali mendorong Gubernur untuk memacu serapan anggaran.

Miliar lebih atau 45,58 persen. Demikian juga dengan capaian target tahapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sampai dengan bulan Mei 2015 sebesar Rp449 miliar lebih atau 33,55 persen dari target Rp1,26 Triliun lebih pada APBD Induk 2015. Ini menunjukan target tahapan sebesar 6,12 persen, sedangkan dalam perubahan direncanakan sebesar Rp1,17 Triliun lebih atau ada penurunan Rp92 Miliar lebih atau 7,31 persen. Gubernur dan staff diminta kerja keras untuk mengembalikan keadaan perekonomian Bali sehingga rencana perubahan PKB

dan BBNKB bisa direalisasikan. Namun demikian, Demokrat menyarankan target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditetapkan menjadi minimal Rp462 Miliar lebih. Sebab, PBBKB sampai bulan Mei 2015 mencapai Rp 192 Miliar lebih atau 59,23 persen sehingga melampau target tahapan sebesar 17,56 persen. Jika saja kuota BBM tidak turun dan harga BBM tidak turun, dalam arti tidak berubah, dalam satu tahun anggaran akan mencapai Rp 462 Miliar lebih." Kami juga menyarankan target perubahan retribusi daerah pada APBD-P

Tahun Anggaran 2015 diubah, yakni retribusi jasa umum Rp 9 Miliar, retribusi jasa usaha Rp15 Miliar lebih atau sama dengan rencana gubernur. Rp15 Miliar lebih, dan retribusi perizinan tertentu Rp28 Miliar," terang Sewi Putra.

Selain itu, gubernur juga diminta untuk menambah modal Bank BPD Bali sebesar 51 persen, agar menjadi milik provinsi Bali. Sedangkan PDIP melalui Ni Kadek Darmini, menyampaikan 14 poin. Di antaranya menyoroti bertambahnya rencana pendapatan daerah dalam APBD-P tahun anggaran 2015 sebesar Rp3 02 Miliar lebih, pos belanja tidak langsung, peningkatan Silpa Rp324 Miliar lebih, dari sebelumnya Rp 580 Miliar lebih menjadi Rp 950 Miliar lebih. Serta mendukung upaya gubernur meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah untuk mendukung penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK. "Lemahnya kualitas SDM itu menjadi masalah serius yang harus mendapat penanggulangan secepatnya," tegas Darmini.

Sedangkan terakhir, dari pandangan umum Fraksi Panca Bayu, yang dibacakan oleh Kadek Nuarta, mengharapkan upaya dari Pemprov agar fasilitas daerah misal seperti Mes Perwakilan Bali di Jakar-

ta direnovasi menjadi hotel dan terciptanya wadah kreatifitas dalam satu tempat untuk menunjang kegiatan pameran, workshop dan juga pementasan budaya melalui Bali Exhibition Centre. (advertorial/pra)

Edisi : sekitar 28 Juli 2015

Hal. : 24



Aksi Boikot Puluhan Anggota DPRD Buleleng

saat Membahas LKPJ APBD 2014

Protes Lambannya Pencairan Bansos dengan Alasan Koordinasi BPK



Puluhan anggota DPRD Buleleng memboikot kehadiran dalam sidang paripurna pembahasan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2014. Diduga puluhan anggota dewan itu melakukan aksi boikot karena masalah pencairan bansos.

EKA PRASETYA, Singaraja

SIDANG kemarin dihadiri Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dan Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra. Sidang dipimpin langsung

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna. Sayangnya pelaksanaan sidang tak diikuti dengan kehadiran anggota dewan.

Sejumlah politisi di DPRD Buleleng terang-terangan mengakui jika absennya mereka dari sidang paripurna, karena masalah pencairan bansos. Salah satunya adalah Made Mangku Ariawan, politisi Partai Demokrat. Mangku Ariawan menyatakan pihaknya kecewa dengan sikap pemerintah yang memilih berhati-hati mencairkan bansos, dengan alasan melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat.

"Hak-hak rakyat tidak direalisasikan, sehingga saya tidak hadir. Uang rakyat *kok* ditunda. Itu sudah hak rakyat

dan sangat dibutuhkan," kata Mangku Ariawan.

Sementara itu Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna menyayangkan sikap sejumlah anggota DPRD Buleleng itu. Supriatna membantah jika dana hibah bansos itu belum cair. Ia menyebut ada beberapa dana hibah bansos yang sudah cair.

"Kami sangat sayangkan kalau tidak hadir hanya karena bansos. Padahal agenda sidang ini jauh lebih penting," ujarnya. Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana pun membantah jika pihaknya menunda pencairan bansos. "Kami tidak ada menunda *kok*. Kami tidak mau mengambil kebijakan yang gegabah. Sekarang sudah diproses untuk dicairkan," kata Agus. (*gup)

Edisi : Selasa, 28 Juli 2015

Hal. : 29



ANGGARAN ✓

Banggar Pertegas Rekomendasi BPK

TABANAN - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan kembali mempertegas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap hasil audit APBD 2014. Banggar yang diketuai langsung oleh Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi ini berharap rekomendasi itu segera ditindaklanjuti lewat serangkaian perbaikan sesuai aturan yang berlaku. Meski untuk hasil audit tersebut Tabanan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Hal itu terungkap dalam Sidang Paripurna yang berlangsung di DPRD Tabanan, Senin (27/7). Kebetulan sidang tersebut mengagendakan pembahasan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 yang sebelumnya diajukan Pemkab Tabanan selaku pihak eksekutif. Adapun hasil akhir dari sidang tersebut, seluruh anggota DPRD yang hadir menyetujui ranperda itu untuk diajukan ke gubernur guna dievaluasi.

Seperti disampaikan Sekretaris Badan Anggaran I Gede Susila dalam pidatonya di hadapan peserta sidang, ada 15 item temuan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal (SPI) dan sebelas item temuan yang menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. "Seluruh item temuan tersebut perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari eksekutif," ujarnya.

Terkait ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014, Badan Anggaran bersama pihak eksekutif telah melakukan serangkaian rapat kerja. Dari hasil rapat ditambah konsultasi-konsultasi yang dilakukan, ada beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian dari pihak eksekutif. Disamping perbaikan seperti yang direkomendasikan BPK terhadap temuan-temuan dalam audit APBD 2014. (gin/gup)

Seluruh item temuan tersebut perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari eksekutif."

I Gede Susila
Sekretaris Badan Anggaran

Edisi : Selasa, 28 Juli 2015

Hal. : 25



PARIPURNA

Dewan Apresiasi Opini WTP

NEGARA - Sidang Paripurna DPRD Jembrana, Senin (27/7) mengagendakan pemandangan umum terhadap beberapa rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kabupaten Jembrana. Ranperda yang dibahas antara lain Pertanggungjawaban APBD tahun 2014, Ranperda Perubahan APBD 2015 serta Ranperda Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Amertha Jati. Saat itu anggota DPRD Jembrana memberi apresiasi atas pencapaian opini pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam rapat dipimpin Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa, enam fraksi di DPRD Jembrana memberikan apresiasi kepada Pemkab Jembrana yang pertama kalinya mendapat opini WTP dari BPK. Enam fraksi itu antara lain Fraksi PDIP melalui Gede Suegardana Cita, Fraksi Demokrat Sejahtera dibacakan Putu Dwita, Fraksi Kebangkitan Nasional disampaikan Siti Ulfa, Fraksi Hanura lewat Ketut Suarta, Fraksi Golongan Karya disampaikan Made Sabda serta Fraksi Gerindra dibacakan Wayan Sudirna. Sudirna mengaku sangat berbangga dengan capaian WTP. "Meski masih ada beberapa catatan untuk segera ditindak lanjuti serta kesalahan administrasi seperti data aset yang dimutakhirkan," tandas dia. (don/gup)

Edisi : Selasa, 28 Juli 2015

Hal. : 29



Dispenda Denpasar Menyerah

Gagal Penuhi Target Pajak Reklame

DENPASAR - Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar tampaknya menyerah untuk mengejar target pajak reklame. Buktinya, dari target pajak reklame di APBD 2015 sebesar Rp 6,1 miliar, pada semester I hanya terealisasi Rp 1,2 miliar. Sebagai jalan pintasnya, Dispenda Denpasar pun mengajukan perubahan target melalui perubahan APBD 2015 menjadi Rp 1,4 miliar, dengan demikian pada semester II hanya cukup mengejar Rp 200 juta.

Kepala Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar, I Dewa Nyoman Semadi saat ditemui di ruangannya, Senin (27/7) mengungkapkan, melihat kondisi pada tahun 2014 lalu, target yang ditetapkan tahun ini sangatlah besar dan sulit untuk terealisasi. Sebab target pendapatan pajak reklame tahun 2014 yang besarnya Rp 5,7 miliar saja, kata Semadi, pada semester I tahun 2014 baru terealisasi sebesar Rp 1,6 miliar dan pada akhir tahun 2014 pun target tersebut gagal dicapai.

"Kami dalam perubahan ini sudah mengusulkan perhitungan kembali atas pemasangan target pendapatan pajak reklame yang besarnya Rp 6,1 miliar. Dengan kondisi seperti ini sulit rasanya tercapai," ujarnya.

Menurut Semadi, dengan kondisi tahun lalu yang juga tidak terealisasi, ditambah tahun ini adanya aturan penataan wajah kota yang membatasi pemasangan reklame di beberapa tempat, tentu saja target pendapatan pajak reklame tahun 2015 yang lebih besar dari tahun sebelumnya

Edisi : Selasa, 28 Juli 2015

Hal. : 22

Radar Bali



Sambutan - -



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

BERJEJAL: Dispenda Kota Denpasar gagal memenuhi target pajak reklame di semester I 2015.

sulit untuk direalisasikan. "Melihat perkembangan Januari - Juni ini mau tidak mau harus kami tinjau kembali target Rp 6,1 miliar ini. Di dalam perubahan ini kami usulkan untuk diturunkan. Kami mintanya menjadi Rp 1,4 miliar," ungkapnya.

Disinggung mengenai kecilnya pendapatan pajak reklame karena banyaknya reklame tidak berizin, Semadi enggan berkomentar. "Intinya kami menarik pajak dari yang berizin. Kalau yang tidak memiliki izin, bukan

berurusan dengan kami. Karena aturan penerbitan izin sudah dilakukan dinas terkait," terangnya.

Terkait realisasi target pajak semester I tahun 2015, Semadi memaparkan, untuk wilayah Kota Denpasar terdapat tiga jenis reklame, yakni reklame kain, papan, dan berjalan. Pendapatan terbesar diperoleh dari reklame papan yakni sebesar Rp. 1.226.417.642,58. Sedangkan untuk reklame kain yakni sebesar Rp. 14.120.000 dan reklame berjalan yakni sebesar Rp 9.635.625. (ayu/yor)

Pajak Reklame Denpasar 2015

Target : Rp 6,1 miliar

Capaian : Rp 1,2-miliar (semester I)

Penyebab : Dispenda Denpasar beralasan target terlalu besar, dan di sisi lain ada aturan penataan wajah kota yang membatasi pemasangan reklame di beberapa tempat.

Upaya : Dispenda menyerah, dan minta melalui perubahan APBD 2015, target pajak reklame diubah menjadi Rp 1,4 miliar saja.

GRAFIS: DYAH FEDIAWATI/RADAR BALI

Edisi : Selasa, 28 Juli 2015

Hal. : 22